

PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI LEGISLATIF MENURUT KACAMATA POLITISI PEREMPUAN DI INDONESIA

Theresia Parwati, Kuspuji Istiningdiah
theres@bps.go.id; istiningdiahkuspuji@gmail.com
Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta

Article Info

Keyword:

Women, Politics, Participation, and Culture Patriarchate

Abstract

Today, women political participation is still low in number. It causes the shortness of women representation in policy and decision making. In fact, the representation of women has not been heard fully in the public space. Many women's voices have not been conveyed. This article examined woman's political participation and communication in the political area in Indonesia. The main problems of this research were why the participation of women in politics in formal institutions relatively low and how the communication role in that matter. This research used descriptive qualitative method by interviewing 18 women politicians in legislative on June 26th until July 4th online. The research findings show the lack of women participation as the representative. The low representation of women in direct political participation was influenced by various internal and external factors. They included women's unwillingness to plunge directly into the world of practical politics, patriarchy cultural factors, and incapability of women to solve lots of real-problems. It is why we still need the right step to create equality and access to women in the political scope.

Copyright © 2020 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia yang secara umum masih menganut budaya patriarki, partisipasi perempuan di ruang publik masih sangat minim. Bahkan untuk negara demokrasi sebesar Amerika Serikat, kaum perempuan baru dapat memberikan hak pilihnya baru setelah 144 tahun Amerika Serikat merdeka. Padahal kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di Amerika Serikat telah berkembang secara pesat sejak publikasi John Stuart Mill yang terinspirasi sang istri Harriet Taylor yakni "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun 1869. Perempuan baru sebatas objek pembangunan dan belum subjek pembangunan. Salah satu penyebabnya karena pada tataran kebijakan masih bias gender.

Di Indonesia, kesadaran kaum perempuan untuk berpartisipasi ke dunia politik secara nyata dimulai dari Gerakan Istri Sedar yang berdiri sejak tahun 1927.

Perhimpunan ini muncul atas dasar permasalahan perempuan Indonesia yang merebak dan adanya keinginan untuk memperbaiki serta menjunjung tinggi derajat kaum perempuan Indonesia, tidak terbatas pada perempuan kalangan atas. Perjuangan ini penting karena posisi politik yang dapat diisi oleh perempuan merupakan salah satu usaha perbaikan status perempuan di Indonesia (Kompas.com, 2012).

Perlakuan diskriminasi terhadap kaum perempuan sudah terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Keberadaan paham patriarki di masyarakat, membentuk pemahaman bahwa laki-laki lebih superior di semua lini kehidupan. Terjadinya perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan telah turun temurun dipraktikkan di masyarakat. Ketidakadilan ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marjinalisasi, subordinasi dan bahkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Corresponding Author:

Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta
Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790
Email: theres@bps.go.id; istiningdiahkuspuji@gmail.com

Adanya anggapan yang selama ini melekat dalam benak masyarakat sehingga mendomestifikasi peran perempuan yang hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga. Sementara laki-laki dianggap sebagai pelaku sentral dalam keluarga. Dalam dunia kerja, tak jarang kaum perempuan mengalami marginalisasi atau proses peminggiran. Salah satu contohnya adalah perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah upah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja (BPS & KPPPA, 2016a). Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan pun masih termarginalisasi. Sebagai contoh, berdasarkan hasil pemilu 2019-2024 persentase anggota parlemen perempuan hanya mencapai 20,52 persen. Dalam pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan, perempuan yang menduduki jabatan struktural PNS tidak sampai 30 persen (BPS & KPPPA, 2016b). Dalam tindak kekerasan, perempuan kerap menjadi objek. Sekitar 1 diantara 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan selama hidupnya sementara untuk yang mengalami kejadian tersebut dalam 12 bulan terakhir ada 1 dari 10 orang perempuan menurut hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 (BPS, Maret 2017).

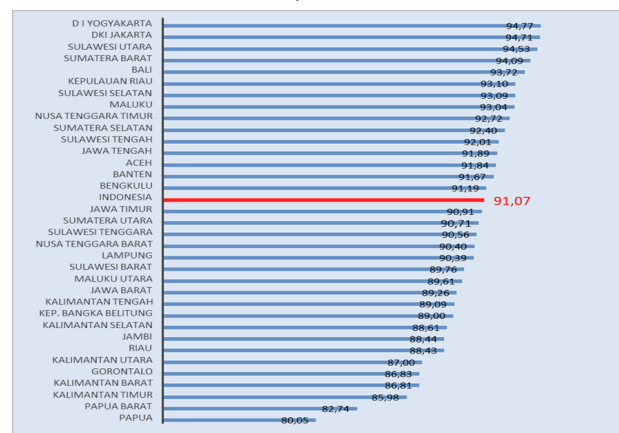
KESETARAAN GENDER

Pada konsep gender yang diakui berbagai ahli, diakui bahwa ada perbedaan kepribadian dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dimana hal tersebut tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang dan struktur sosial masyarakat tertentu. Seperti yang ditulis oleh Oakley dalam Dauley (2007), gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan.

Paradigma yang muncul dibenak masyarakat saat ini menerjemahkan gender sebagai jenis kelamin. Secara etimologis kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 1983). Berdasarkan perkembangan konsep gender, maka gender merujuk pada laki-laki dan perempuan, status keduanya dan posisi relatif antar keduanya

(Lopez-Carlos and Zahidi, 2005). Gender merupakan sebuah variabel sosial ekonomi yang muncul sebagai akibat dari hubungan berbagai faktor seperti ras, umur, kelompok sosial dan etnis. Salah satu isu kesetaraan gender di Indonesia juga tertuang dalam visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik individu, wilayah, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, tidak mengherankan jika penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Gambar 1. Indeks Pembangunan Gender Menurut Provinsi, Tahun 2019



Sumber : BPS, 2019

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas keberhasilan pembangunan dalam hal kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Besaran nilai IPG tahun 2019 adalah 91,07 yang berarti kualitas pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik dan memperhatikan kesetaraan gender. Dari gambar diatas dapat dilihat sebaran variasi nilai indeks pada masing-masing provinsi, dimana indeks tertinggi Provinsi DI Yogyakarta dan terendah Provinsi Papua. Sebanyak 19 dari 34 provinsi, nilai Indeks Pembangunan Gendernya masih dibawah angka nasional Indonesia. Perbedaan ini sudah barang tentu berimplikasi pada intervensi program pemerintah berbeda untuk setiap provinsi.

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

Meskipun komposisi penduduk perempuan

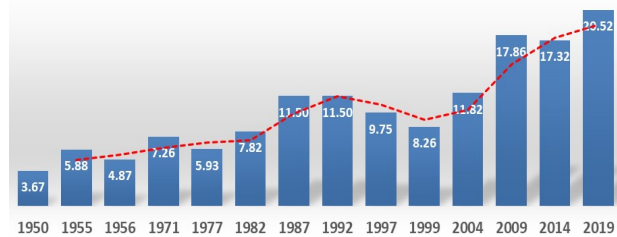
Indonesia tergolong besar (lebih dari separuh penduduk), namun partisipasinya diruang publik masih sangat minim karena perempuan masih termarginalisasi secara politis, sosial, kultural dan ekonomis-yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan. Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis yang menjamin adanya kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas.

Keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai merupakan salah prasyarat untuk memastikan terpenuhinya kepentingan kaum perempuan. Laporan perkembangan PBB tahun 1995 yang menganalisis gender dan pembangunan di 174 negara menyatakan bahwa: “Meskipun benar bahwa tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antar tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, [tetapi] 30 persen keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang berarti dalam politik” (Suryani 2010).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kita berharap agar persentase perempuan yang duduk di parlemen dapat meningkat hingga 30 persen sehingga secara otomatis partisipasi perempuan dalam pembangunan juga akan meningkat. Salah satu capaian reformasi yang penting, kaitannya dengan konteks ini adalah aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 260 juta jiwa dan sekitar 50 persen di antaranya adalah penduduk perempuan. Secara nyata, ini adalah potensi yang sangat besar.

Gambar 2. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dari Pemilu 1950-2019



Keterangan : Diolah dari berbagai sumber

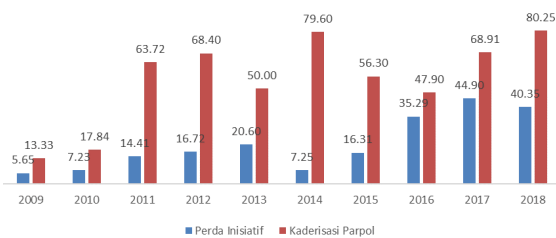
Namun demikian, dari Pemilu ke Pemilu peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan. Tahun 2004, jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 65 orang atau 11,82 persen. Persentase ini naik menjadi 17,86 persen untuk Pemilu 2009 dan 17,32 persen untuk Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 yang lalu, dari 575 orang anggota DPR yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024, sebanyak 118 orang (20,52 persen) diantaranya adalah perempuan. Kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih belum dapat direalisasikan hingga saat ini.

Persoalan *affirmative action* ini juga ibarat dua sisi mata uang. Disatu sisi, ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara khusus di legislatif, namun disisi lain juga bisa mengeneralisasi rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan yang seolah ‘dipaksakan’ hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Terlampaunya kaum perempuan berada jauh dari pusaran dunia politik membuat politisi perempuan harus mau lebih bekerja ekstra. Permasalahannya adalah kaderisasi dan pendidikan politik belum berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga tidaklah heran jika mereka yang kemudian terpilih adalah yang memiliki modal besar atau bahkan yang memiliki wajah menarik (Todorov, 2006).

Sejumlah partai politik telah memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi masih banyak juga yang hanya memberikan peran-peran kecil hanya untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang sehingga perempuan lebih sering ditempatkan pada

posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan keuangan, konsumsi dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian besar partai politik memenuhi batas minimum kuota 30 persen perempuan, namun karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakkan. Faktor kualitas calon perempuan juga masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menem- pa kader-kader politisi perempuan yang mempunyai potensi dan melihat kualitas. Masih minimnya kade- risasi ini juga secara umum berdampak pada rendahnya output legislatif yang salah satunya adalah menghasilkan Perda/Undang-undang.

Gambar 3. Kaderisasi dan Lahirnya Perda Inisiatif



Sumber : Diolah dari data Indeks Demokrasi Indonesia, 2009-2018

PERSOALAN KOMUNIKASI POLITIK

Tuntutan terhadap peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicara- kan sejak akhir tahun 1998. Isu mengenai hak-hak per- empuan untuk pertama kalinya dikedepankan dalam

kampanye pada Pemilu 1999. Hasil Pemilu 1999, men- catat tampilnya Megawati Soekarnoputri (seorang per- empuan) sebagai pemimpin yang paling populer dan partai yang dipimpinya PDI-P, mendapat suara terbesar dalam Pemilu. Keikutsertaan perempuan dalam kanehan politik bukan suatu hal yang mudah karena bu- daya patriarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Ket- erwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial). Perbedaan persepsi dan konstruksi sosial ini menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang politik (Agustina 2009). Demikian pula halnya dengan komunikasi poli- tik, banyaknya dominasi kaum lelaki di parlemen me- nyebabkan perempuan yang duduk di lembaga legislatif pun harus berkomunikasi secara *gentle* ala laki-laki. Hal ini lakukan agar “suara” perempuan “didengar” dan direalisasikan.

KAJIAN PUSTAKA

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiti- f, dengan metode dan jenis penelitian deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPR RI/DPRD Perempuan Tahun 2019-2024 dan beberapa politisi perempuan.

Responden dalam penelitian ini adalah politisi perempuan di DPR/DPRD berikut:

Nama Lengkap	Umur	Pendidikan terakhir	Asal Partai
Agustina	26	S2	PDIP
Ineu Purwadewi Sundari	45	S3	PDIP
Ribka Tjiptaning	63	S2	PDIP
Rany Mauliani	42	S1	Gerindra
Puti Guntur Soekarno	50	S1	PDIP
Sri Ruwiyati	57	S2	PDIP
Khairunisa	36	S1	PDIP
Mirza R. Kesuma (Chicha Koeswoyo)	52	SMA	PDIP
Leonie Agustina	64	S3	PDIP
Mey Rini	48	SMA	PDIP
Ellen Taroreh	49	SMA	PDIP
Diah Pitaloka	42	S2	PDIP
Christine Panjaitan	59	S1	GolKar
Jasmin Kartiasa	65	S1	Gerindra
Merry Hotma, S.H	57	S1	PDIP
Athea Sarastiani	54	S3	GERINDRA
Krisdayanti	45	SMA	PDIP
Kristina Iswandari	44	S1	Nasdem

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pendapat Mc Nabb (2002:148) yang mengkategorikan tahapan analisis data penelitian ke dalam 6 (enam) tahapan kegiatan, sebagai berikut: *Organize the Data* (Pengorganisasian Data), *Generate Categories, Themes and Patterns* (Penggenceralisasian kategori, tema dan topik penelitian), *Code the Data* (Pengkodean Data), *Apply the Ideas, Theme and Categories* (Penerapan Ide, Tema dan Kategorisasi), *Search for Alternative Explanations* (Pencarian Alternatif Penjelasan), *Write and Present the Report* (Menulis dan Menyajikan Laporan). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pandangan politisi perempuan terhadap partisipasi politik di legislatif.

Kedelapan belas orang ini diwawancarai dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang berisi opini, persepsi dan saran terkait partisipasi dan komunikasi politik perempuan di DPR/DPRD tahun 2019-2024. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan selama sembilan (9) hari dari tanggal 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2020 melalui Google Form.

Kajian Konseptual

Definisi komunikasi menurut Nimmo (1989) dinyatakan dengan mengatakan apa yang bukan: “komunikasi bukan sekedar penerusan informasi dari suatu sumber kepada publik; ia lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi dengan simbol, slogan atau tema pokok. Politik dapat diartikan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; termasuk didalamnya pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Nimmo 1989). Komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol berarti. Ini menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan

komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sikap-sikap integratif (AP, 2010 :1.17).

Dari pengertian komunikasi politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat strategi yang seharusnya ada ketika berkomunikasi secara politik. KARENA itu, partai politik seyogyanya memiliki strategi komunikasi politik bagi kader perempuannya. Seperti yang diungkapkan Rush dan Althoff (dalam Suryani 2010) bahwa komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia memerankan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisai politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik disatu pihak, dan di pihak lain, komunikasi politik juga bisa menekan partisipasi politik.

Strategi komunikasi yang diperlukan dalam kaitan dengan partisipasi perempuan dan keterwakilan di lembaga legislatif, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi komunikasi politik perempuan dan strategi komunikasi politik partai politik (Mukarom 2008). Strategi komunikasi perempuan dilakukan melalui *counter* komunikasi politik. *Counter* komunikasi politik tentu saja bukan hanya dilakukan oleh politisi perempuan tapi juga harus melibatkan politisi laki-laki (Mukarom 2008). Penelitian yang pernah ada memperlihatkan bahwa perempuan cenderung berkomunikasi secara tidak langsung dibanding dengan laki-laki. Akibatnya, dalam menyampaikan aspirasi, perempuan belum sepenuhnya aktif dan berani dalam menyuarakan pendapatnya. Hal ini memperlihatkan juga pentingnya pendidikan komunikasi politik bagi perempuan agar mempunyai keterampilan dan keberanian dalam menyuarakan pendapat dan isu gender di parlemen.

Indonesia yang masih menganut sistem patriarki, menjadi salah satu alasan terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses berpolitik. Hal itu dikarenakan persepsi masyarakat yang masih mengotak-ngotakkan pembagian peran antara laki-laki dalam ruang publik dan perempuan dalam ranah domestik (Sugiharto 2014). Perempuan tampaknya mempunyai permasalahan dalam arena politik. Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun

sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam (Suryani 2010).

Gaffar (2001) dalam Nirmala (2012) mengemukakan bahwa hambatan bagi perempuan masuk ke dunia politik karena konstruksi sosial kita yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik. Faktor utama yang paling menentukan adalah kuatnya pandangan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan diragukan kemampuannya ketika harus memegang jabatan-jabatan politik. Di samping itu, masyarakat memandang dunia politik sebagai dunia yang penuh dengan "kekerasan", sebagai *arena struggle of power*. Akibatnya, banyak yang menganggap dunia politik adalah dunia laki-laki (Usman, 1998) dalam Nirmala (2012). Huntington dan Nelson (1994) mengemukakan, bahwa keterlibatan dalam politik adalah sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan partisipasinya perempuan mendapatkan banyak kendala. Menurut Lycette (dalam Mukarom 2008) terdapat paling sedikit empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, yaitu disebabkan karena:

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah;
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh;
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan.
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi

dalam pendidikan atau program Keluarga Berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.

Dari beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa partisipasi di arena politik masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan hanya menduduki porsi kecil dari berbagai jabatan yang ada baik di ranah legislatif maupun bidang lainnya.

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang, termasuk juga bidang politik. Namun, hak yang sama itu tidak dibarengi dengan kesempatan yang sama, sehingga keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi timpang (Agustina, 2009). Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
2. Pembagian kerja berdasarkan *gender* dalam masyarakat agraris-tradisional
3. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
5. Kurangnya *political will* pemerintah
6. Kekurangan kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik.

TEMUAN DAN DISKUSI

Indonesia yang masih menganut sistem patriarki, menjadi salah satu alasan terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses berpolitik. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya persepsi masyarakat yang masih mengotak-ngotakkan pembagian peran antara laki-laki dalam ruang publik dan perempuan dalam ranah domestik (Sugiharto, 2014). Perempuan tampaknya mempunyai permasalahan dalam arena politik. Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu

dilakukan pengkajian lebih mendalam (Suryani 2010 dalam IPG 2019).

Lebih jauh lagi disebutkan hambatan bagi perempuan masuk ke dunia politik karena konstruksi sosial kita yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik (Nirmala, 2012). Faktor utama yang paling menentukan adalah kuatnya pandangan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan diragukan kemampuannya ketika harus memegang jabatan-jabatan politik. Di samping itu, masyarakat memandang dunia politik sebagai dunia yang penuh dengan "kekerasan", sebagai *arena struggle of power*. Akibatnya, banyak yang menganggap dunia politik adalah dunia laki-laki (Usman, 1998) dalam Nirmala (2012). Bahkan Huntington dan Nelson (1994) secara lebih ekstrim menyatakan bahwa keterlibatan dalam politik adalah sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Di Indonesia sendiri masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan hak-hak politik perempuan dan kesetaraan di bidang kerja juga masih menjadi tuntutan aktivis perempuan melalui berbagai kegiatan advokasi dan sosialisasi dengan tujuan memberikan motivasi agar kaum perempuan memiliki kesadaran terhadap hak-hak mereka di bidang pekerjaan dan di bidang politik. Mereka bahkan mendorong agar perempuan memiliki keyakinan untuk terjun secara langsung ke dunia politik sebagai agenda penting agar perempuan dapat terlibat secara memadai dalam proses politik dengan cara menumbuhkan kesadaran dan memberikan motivasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka di berbagai bidang, terutama di bidang politik dan pekerjaan. Sebab, disadari atau tidak faktor internal yang ada pada kaum perempuan seperti rasa percaya diri dan motivasi untuk berpartisipasi di ranah publik akan menjadi penentu dalam membangun kualitas kesetaraan gender.

Realitasnya untuk membangun kesadaran ini bukanlah persoalan mudah karena budaya patriaki yang dominan di masyarakat telah mengkonstruksi nilai-nilai yang menyebabkan sebagian besar perempuan kurang percaya diri dan enggan untuk terjun di dunia politik ataupun secara terbuka berkompetisi dengan laki-laki

dalam meraih jabatan di tempat kerja. Rendahnya jumlah perempuan yang mampu menembus lingkaran elit politik salah satunya disebabkan perempuan cenderung kurang percaya diri dan memiliki keengganan untuk berkompetisi. Diakui oleh beberapa politisi perempuan di DPR/DPRD yang berhasil diwawancarai bahwa tidak mudah bagi perempuan untuk bisa menduduki kursi di DPR/DPRD. Menurut mereka ada sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan politisi perempuan untuk dipercaya menduduki kursi diparlemen sebagaimana terangkum dari hasil wawancara berikut ini :

1. Terjun ke dunia politik sangat penting buat kaum perempuan.

Puti Guntur Sukarno (Komisi X-DPR RI):

Meyakini bahwa dunia politik yang sebenarnya, membawa manfaat dalam kebijakan untuk masyarakat dan memberikan pengawasan kerja pemerintahan.

Mery Hotma (Komisi E-DPR RI):

Dunia politik itu adalah sarana kita untuk menyampaikan ide, pendapat, kritikan, atau masukan kepada publik (pemerintah) secara yang dilaksanakan melalui organisasi politik.

2. Sekalipun dunia politik merupakan hal yang penting buat kaum perempuan, namun bukan merupakan hal yang mudah bahkan dunia yang keras buat kaum perempuan.

Khairunissa (Bidang Perempuan dan Anak-PDIP Jakarta Pusat):

Dunia politik bagi kaum perempuan adalah dunia yang 'keras', dunia yang siapapun masuk didalamnya harus kuat dan berani serta tidak mudah jatuh, dunia yang mengajarkan kita utk selalu bangkit dan bangkit lagi. Dunia politik juga akan membentuk jiwa seseorang jauh lebih kuat dalam menghadapi hidup. Politik juga memberikan kesempatan utk mengenal lebih banyak karakter manusia, membantu sesama, menjadikan kita lebih tepo seliro.

3. Namun demikian, sekalipun tidak mudah bagi politisi perempuan untuk bisa masuk ke dunia politik, namun menurut mereka, dunia politik menarik dijalani.

Mery Hotma (Komisi E-DPR RI):

Kedudukan perempuan dalam politik sangat berpengaruh kepada keputusan politik partai atau politik pemerintah, sangat berpengaruh kepada dinamika politik secara umum dan sangat berpengaruh kepada kemajuan berpolitik perempuan itu sendiri.

Puti Guntur Sukarno (Komisi X-DPR RI):

Meyakini bahwa dunia politik yang sebenarnya, membawa manfaat dalam kebijakan untuk masyarakat dan memberikan pengawasan kerja pemerintahan.

Elen Taroreh (Ketua DPC PDIP Jakarta Selatan):

Perempuan harus lebih berperan aktif di dunia politik saat ini karena perempuan berpolitik selalu pakai hati dan lemah lembut dalam penyampaian aspirasi politik, itu akan membuat variasi dalam dunia politik yang katanya keras dan identik dengan laki-laki.

4. Beberapa perempuan mencoba untuk keluar dari kungkungan budaya patriarki dengan tetap terjun ke dunia politik untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa dan Negara.

Krisdayanti (Komisi IX-DPR RI):

Pengabdian yang lebih tegas dan terarah melalui politik dan kita ikut berkontribusi arah pembangunan bangsa melalui pembuatan undang-undang, fungsi pengawasan dan anggaran.

Mery Hotma (Komisi E-DPR RI):

1. Ingin berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan sosial
 2. Ingin mempengaruhi kebijakan hukum
 3. Ingin mempengaruhi kebijakan ekonomi
 4. Ingin mempengaruhi kebijakan politik.
5. Perlu ada upaya upaya yang *ekstraordinary* untuk bisa benar-benar berkiprah, perlu ada peningkatan kualitas dari para politisi perempuan yang masih rendah dimata sebagian politisi perempuan juga.

Ribka Tjiptaning (Komisi IX-DPR RI):

Masih terlalu minimal baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Puti Guntur Sukarno (Komisi X-DPR RI):

Sudah banyak perempuan perempuan menjadi

pimpinan di komisi komisi diharapkan dapat memberikan perhatian pada perjuangan wanita yg seringkali menemui halangan

Sri Ruwiyati (Komisi E DPRD Prov Jawa Tengah):

Masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak mempunyai kemampuan diatas laki laki. Sehingga anggota dewan perempuan masih dianggap lemah.

6. Hambatan yang dialami oleh politisi perempuan terkait keberadaannya sebagai Anggota DPR/DPRD secara umum adalah terkait keterbatasan waktu dan pembagian peran dikeluarga.

Ineu Purwadewi Sundari (Pimpinan DPRD Jawa Barat):

Waktu bersama keluarga berkurang. Hambatan apabila sedang membahas Raperda kadang kita harus konsentrasi selain memakan waktu panjang, suka lembur, harus juga mengikuti agenda-agenda tersebut agar bisa terlibat, berjuang untuk hasil kebijakan yang baik dan maslahat bagi masyarakat.

7. Hambatan khusus terkait komunikasi juga dialami oleh sebagian politisi perempuan ini.

Ineu Purwadewi Sundari (Pimpinan DPRD Jawa Barat):

“Komunikasi politik, masalah waktu, dan kalo melakukan debat2 dlm forum hrs berhadapan dg laki-laki”

8. Dalam mengatasi hambatan terkait komunikasi politik tersebut, sebagian besar (17 dari 18 responden) menyatakan cukup sering bahkan sangat sering melakukan komunikasi dengan masyarakat.
9. Komunikasi politik dengan masyarakat, menurut responden dapat dilakukan melalui dengan turun langsung ke masyarakat baik secara langsung, melalui tim di masing-masing Dapil ataupun dapat dilakukan melalui Rumah Aspirasi.
10. Belum lagi masalah/hambatan lain seperti penuturan **Ribka Tjiptaning (Komisi IX-DPR RI):** *“Banyaknya kompromi politik yang kadang tidak sejalan dengan pikiran dan naluri hati kita”* dan **Cicha Koeswoyo (Wakabid Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak):** *“Kurangnya partisipasi secara vertikal antara wakil rakyat dan rakyat”*

11. Hasil studi yang dilakukan terhadap delapan belas (18) orang anggota DPR/DPRD periode 2019-2024 menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi perempuan Indonesia adalah terkait kultur.

Khairunissa (Bidang Perempuan dan Anak-DPC PDIP):

Sistem patriarki dimana laki-laki sebagai imam yang hidup lama di masyarakat mengakibatkan kesempatan banyak diberikan kepada laki-laki, begitu pula siapa yang memimpin itu banyak laki-laki juga. Intinya kesempatan perempuan utk tampil tidak seluas laki-laki.

Krisdayanti (Komisi IX-DPR RI):

Adanya stigma bahwa perempuan adalah 'konco wingking', ini yg harus diubah.

Kristina (Caleg Nasdem 2019):

Kultur yg masih banyak menempatkan perempuan pada urusan domestik dan menganggap perempuan berkerja dan berkarir tidak penting.

12. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan kultur ini adalah melalui upaya cara menyetarakan peran perempuan dan laki-laki di Indonesia. Bahkan secara tegas, **Ribka Tjiptaning (Komisi IX-DPR RI)** menyatakan "Perempuannya sendiri jangan menyerah, jangan menunggu kesempatan tetapi merebut kesempatan". Sejalan dengan itu **Ineu Purwadewi Sundari (Pimpinan DPRD Jawa Barat)** menyatakan dengan perempuan terlibat dalam politik, perempuan juga terus menambah ilmu, sekolah tinggi, ikut menjadi bagian di lembaga pemerintahan, swasta atau di tempat aktivitas perempuan dalam keseharian dengan jabatan atau peran yang strategis sehingga terlihat bahwa adanya kesetaraan peran perempuan dan laki-laki.

13. Beberapa politisi menyuarakan pendapat terkait saran beberapa cara untuk menegakkan kesetaraan gender.

Agustina (Komisi A-DPR RI):

Dengan memberi ruang kuota bagi perempuan di berbagai bidang

Khairunissa (Bidang Perempuan dan Anak-DPC PDIP):

Mengubah mindset laki dan perempuan juga dengan memberikan pendidikan politik di keluarga dan tugas pemerintah (kesbangpol) memberikan seminar-seminar.

Cicha Koeswoyo (Wakabid Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak):

Menghilangkan tindak diskriminatif dan pelecehan seksual terhadap perempuan, memberikan ruang untuk perempuan berpartisipasi dalam berpendapat/politik.

Leonie Agustina (wakil pimp DPRD bidang perempuan, pendidikan, kesehatan & anak):

Ada edukasi terhadap laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan lebih objektif

Diah Pitaloka (Komisi VIII_DPR RI)

Akses pendidikan

Nampaknya, harapan kaum perempuan untuk mewujudkan persamaan di bidang politik masih jauh dari kenyataan. Ini terlihat dari masih belum signifikannya keberadaan perempuan di parlemen nasional dan daerah. Artinya, jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30 persen). Ditambah lagi keberadaan perempuan yang berkiprah di dunia politik tersebut ternyata belum mampu menawarkan kultur politik yang berbeda. Perempuan belum mampu menunjukkan diri sebagai agen perubahan. Hal ini ditunjukkan dengan peran dan fungsi dalam lembaga yang masih didominasi politisi laki-laki, terutama untuk komisi dengan isu-isu sentral. Sebagai konsekuensinya, kebijakan yang memperjuangkan isu perempuan, sebagai contoh rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), rentan dikeluarkan dari prioritas prolegnas. Perspektif perempuan dalam permasalahan sosial politik lainnya juga kurang bisa mewarnai kebijakan yang ada, sehingga hasilnya kebijakan kita bernuansa patriarkis.

Partisipasi politisi perempuan juga belum mewakili beragam kepentingan karena Sebagian besar perempuan yang terpilih dan berkiprah di dunia politik formal saat ini berasal dari dinasti politik atau figur populer seperti artis. Data-data dan fakta di atas menunjukkan bahwa kontribusi perempuan di parlemen belum signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap delapan belas (18) anggota DPR/DPRD perempuan periode 2019-2024 dan beberapa politisi perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kedudukan yang sama, seorang politisi perempuan belum tentu memiliki peran yang sama, karena banyak kendala yang dihadapi antaranya, tingkat pendidikan, latar belakang organisasi, pengalaman, dan intens komunikasi yang dibangun politisi perempuan dengan orang lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh rendahnya partisipasi politik perempuan yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yakni kendala yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri yang secara langsung mempengaruhi pribadi perempuan dalam memutuskan untuk masuk ke kancah politik. Sementara kendala eksternal yakni kendala yang berasal dari luar perempuan yaitu terbatasnya jumlah dan peran perempuan dalam lembaga pengambilan kebijakan, sistem budaya patriarki dan kuatnya nilai tradisional, serta peluang 30 persen perempuan masuk dalam kancah politik.
3. Kendala Internal
Kendala Internal yang dimaksud adalah yang berasal dari diri politisi perempuan itu sendiri, seperti: (1) Pandangan sub ordinat dari masyarakat yang menempatkan kedudukan kaum perempuan sebagai orang nomor dua karena peran sehari-harinya hanya berputar pada ranah domestik (dalam rumah) sebagai istri dan mengurus anak-anak yang dilahirkan, namun disisi lain ada pula yang menganggap perempuan sebagai partner hidupnya. (2) Kebanyakan kaum perempuan tidak memiliki rasa percaya diri bahkan yang lebih dominan adalah rasa minder atau rendah diri apabila diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu kegiatan atau jika ditugaskan untuk memimpin suatu kegiatan, (3) Konflik peran yang dialami Politisi Perempuan.
4. Kendala Eksternal
Beberapa kendala yang bersifat internal di atas

disebabkan oleh kendala yang bersifat eksternal seperti: (1) Sistem nilai dan budaya yang ada dimasyarakat yang memperlakukan laki-laki lebih bernilai daripada perempuan berakibat posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. (2) Budaya patriarki sangat kental dalam masyarakat kita, selain itu karena SDM dari kaum perempuan masih lemah. (3) Minimnya pendidikan partai politik oleh partai politik yang berbasis kebutuhan gender.

5. Komunikasi politik dan perempuan memiliki strategi yang seharusnya dapat mendorong perempuan untuk berpolitik secara sehat. Perempuan mendapatkan kesempatan dalam berbicara dan menyuarakan pendapat. Perempuan tidak seharusnya berkomunikasi ala laki-laki sehingga partisipasi perempuan semakin tinggi dalam arena politik. Dengan demikian kiprah perempuan di legislatif dapat terlihat signifikan dalam menyuarakan isu gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H. (2009). *Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Dalam Siti Hariti Sastriyani (ed): Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Amalia, L.S. (2012). *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen di Indonesia: Suatu Analisis*. Dalam Sarah Nuraini Siregar (ed): Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: PT. Gading Inti Prima
- Ayu Putu Nantri. 2004. "Perempuan dan Politik". *Jurnal Perempuan* (online). Gaffar, Afan, 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- BPS. 2019. "Indeks Pembangunan Gender", Jakarta-Daulay Harmona. B(2006). *Buruh Perempuan di Industri Manufaktur Suatu Kajian dan Analisis Gender*. *Jurnal Wawasan*. Edisi Februari 2006/ Volume 11, Nomor 3.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1983). *Kamus*

- Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
- Huntington, dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta
- Lopez-Claros, A. and S. Zahidi. (2005), "Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap", www.webforum.org/pdf/Global_Competitiveness.../gender_gap.pdf.
- Maran, R. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiarjo, M. 2008, *Pengantar Politik Indonesia*, PT Pustaka Yogyakarta.
- Mukarom, Z. (2008). *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang keterwakilan Perempuan di Legislatif*. MediaTor. Vol. 9. No. 2, Desember: 257-269.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remadja Karya
- Nirmala Afrianti Sahi. 2012. "*Studi Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Gorontalo*", Gorontalo
- Serafica Gischa. 2012. "*Istri Sedar: Pergerakan Politik Perempuan Pertama di Indonesia*", Kompas.com- Jakarta
- Sugiharto, I. (2014). *Perempuan Muda dan Partisipasi Politik*. <https://www.jurnalperempuan.org/blog-muda1/perempuan-muda-dan-partisipasi-politik>.
- Suryani, I. (2010). *Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Usman, S. 1990. *Elite dalam Perspektif Sosiologi. Laporan Penelitian*. Fisipol UGM. Yogyakarta.